

HOOGERE BURGERSCHOOL (HBS) : PENDIDIKAN UNTUK KAUM ELITE DI SURABAYA TAHUN 1923-1950

Indra Cipta Jaya

Gayung Kasuma

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Hoogere Burgerschool di Surabaya antara tahun 1923-1950. Hoogere Burgerschool adalah suatu sekolah atau institusi pendidikan untuk kaum elite yang cukup terkenal di Surabaya. penelitian ini membahas mengenai kontribusi dari Hoogere Burgerschool pada masa kolonial, pendudukan tentara Jepang, dan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu Hoogere Burgerschool mengalami banyak perubahan akibat dari perbedaan kebijakan dari pemerintah yang berkuasa. Penelitian ini akan berfokus pada perubahan yang terjadi dan bagaimana kontribusi dari Hoogere Burgerschool pada tiga periode tersebut. Hoogere Burgerschool merupakan sekolah untuk pendidikan untuk kaum elite yang memiliki kontribusi penting bagi sejarah Indonesia khususnya sejarah Kota Surabaya.

Kata kunci: Hogere Burgerschool, pendidikan, kaum elite

ABSTRACT

This study be explain to discuss about Hoogere Burger school in Surabaya during 1923-1950. Hoogere Burgeerschool is education institution for elite class in Surabaya. This study discuss about contribution of Hoogere Burgerschool in colonial period, Japan period, and after Indonesia freedom proclamation. In that period Hoogere Burgerschool has many alteration or change because different rule from government. This study focused the alteration and how contribution of Hoogere Burgerschool of three period. Hoogere burgerschool the school for elite class has important contribution in Indonesia history especially Surabaya history.

Key words: Hoogere Burgerschool, education, elite class

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses perubahan cara berfikir maupun tingkah laku seseorang maupun kelompok dalam rangka membantu mengembangkan potensi serta kemampuannya agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya baik sebagai seorang individu maupun sebagai warga negara atau masyarakat (Depdikbud, 1992: 232). Proses dalam melangsungkan pendidikan dilakukan dengan memilih isi, strategi kegiatan dan teknik pelatihan yang sesuai. Dilihat dari sudut perkembangan yang dialami manusia, maka usaha yang sengaja dan terencana tersebut ditujukan untuk

membantu manusia dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang dialaminya dalam setiap periode perkembangan. Dengan kata lain, pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan terutama dalam mencapai keberhasilan perkembangan kehidupan manusia (B. Suryosubroto dalam Astutik, 2005: 1).

Pada masa kolonial di Hindia Belanda, pendidikan dikelola oleh orang-orang Eropa (khususnya Belanda). Pendidikan yang terbentuk pada masa itu dikembangkan menurut model Barat, baik organisasi maupun kurikulum yang digunakan untuk melaksanakan suatu

1) Mahasiswa Ilmu Sejarah angkatan 2006

2) Dosen Departemen Ilmu Sejarah FIB Universitas Airlangga

pendidikan. Orientasi pelaksanaan pendidikan dikembangkan untuk mengisi kekosongan tenaga terdidik. Sebagian tenaga terdidik diserap untuk kepentingan perusahaan khususnya perusahaan perkebunan. Saat itu perkebunan memerlukan tenaga terdidik bumiputra yang dapat berbahasa Belanda. Sebagian lagi, tenaga terdidik dibutuhkan untuk mengisi kekosongan posisi administrasi pemerintah kolonial (Heru Sukardi, 1980: 34).

Hubungan antara pendidikan dan masyarakat merupakan hubungan yang kompleks. Mengingat kontrol pendidikan dan pemerintahan ada di tangan orang-orang Eropa (Belanda), maka aspirasi-aspirasi yang berkembang pada masyarakat cenderung berbeda-beda mengikuti perkembangan dari kebijakan pemerintah Belanda. Akibatnya diantara masyarakat kolonia³⁾ terdapat cara pandang yang berbeda dengan masing-masing alasannya untuk memaknai pendidikan yang ada. Sebagian menerima dan melihat kehadiran sekolah-sekolah itu sebagai sesuatu yang menguntungkan, karena pendidikan yang merupakan kebutuhan masyarakat telah di fasilitasi oleh pemerintah. Sebagian lagi menolak dan cenderung bersikap apatis dengan berbagai alasan. Keanekaragaman pandangan ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam situasi kolonial, masyarakat memiliki kebebasan dalam menentukan pendidikan yang mereka inginkan, yaitu menerima atau menolak yang ditawarkan pemerintah kolonial, atau mengambil pilihan lain menurut cara-cara yang

mereka anggap lebih aman.⁴⁾

Kondisi Pendidikan di Surabaya

Kondisi pendidikan yang ada di Surabaya di masa kolonial mendapat perhatian dari pemerintah Hindia Belanda. Perhatian itu didasari oleh politik etis. Tujuan dibentuknya sekolah di Surabaya yaitu memperhatikan pendidikan di tanah jajahan dan menyediakan tenaga terdidik. Alasan itu mendorong pemerintah Kota Surabaya membentuk pendidikan bagi orang Eropa maupun Bumiputra. Sekolah-sekolah pun dibentuk dengan mengadopsi sekolah yang sebelumnya ada di Batavia.

Sekolah yang diadopsi pertama kali adalah *Europeesche Lagere School* (ELS). ELS dibentuk pertama di Batavia pada 24 Februari 1817, kemudian didirikan juga di Surabaya pada tahun 1920. Berangsur-angsur banyak sekolah didirikan di Surabaya, seperti Sekolah Dasar Kelas Satu dan Dua pada tahun 1849-an (yang serupa dengan *Hollandsch Inlandsche School*) dan *Hoogere Burgerschool* (HBS) pada tahun 1875 (Wasty Soemanto, 1983: 41-42). Surabaya memiliki beberapa sekolah yang didirikan oleh pemerintah kota, tetapi yang dapat memasuki sekolah tersebut hanya beberapa orang tertentu saja. Orang-orang tersebut adalah sebagian besar orang Eropa, dan beberapa tokoh terkemuka Bumiputra. Diskriminasi semacam ini tidak terjadi di Surabaya saja melainkan di tempat lain di Hindia Belanda dimana dominasi orang Belanda begitu kuat.

Atas diskriminasi itu warga Surabaya yang peduli pendidikan

3) Masyarakat Kolonial disini mengandung arti masyarakat yang hidup di tanah jajahan Belanda di periodisasi Kolonial. Didalamnya termasuk orang Eropa, Bumiputra, maupun Timur Asing.

4) Menerima disini bermakna bahwa masyarakat memasuki sekolah-sekolah bentukan pemerintah Hindia Belanda, dengan konsekuensi harus mematuhi segala persyaratan yang telah ditentukan. Biasanya yang menerima berasal dari golongan orang Eropa, Priyai, atau golongan Elite lainnya. Adapun yang menolak dapat memilih sekolah yang berada di luar wewenang dan tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda, seperti sekolah keagamaan seperti padepokan dan pesantren. Pihak yang mengambil pilihan lain menurut cara-cara yang mereka anggap lebih aman mengandung arti bahwa masyarakat memilih untuk tidak bersekolah. Untuk yang menolak atau yang memilih cara lain biasanya dari masyarakat Bumiputra dari golongan menengah kebawah. dalam Astutik, "Pendidikan Dasar Umum di Surabaya tahun 1945-1964 : Tinjauan Historis Terhadap Eksistensi Sekolah Rakyat.", (Skripsi Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, 2005). hlm. 2

mendirikan sekolah liar. Sekolah liar ini didukung dan dididani oleh organisasi-organisasi masyarakat bentukan Bumiputra. Menjelang akhir 1930-an jumlah sekolah semacam ini mencapai 75 buah, dengan sekitar 200 orang guru, dan melayani sekitar 7.500 orang murid. Sekolah semacam ini sangat diminati terutama oleh bumiputra kalangan menengah kebawah. Pada tahun 1940 jumlah murid yang bersekolah di sekolah liar empat kalilipat dibandingkan dengan bumiputra yang bersekolah di sekolah Negeri bentukan pemerintah Kota Surabaya (William H. Frederick, 1989: 76).

Pada masa Jepang diskriminasi pendidikan semacam ini sengaja dihilangkan, karena Jepang membawa pandangan bahwa bangsa Eropa kedudukannya sama dengan bangsa lain. Pemerintah Jepang saat itu mengeluarkan kebijakan pada sekolah yang ada sebelumnya untuk dihapuskan dualisme pengajaran, yang artinya sekolah-sekolah yang sejenis disamaratakan dan diskriminasi menurut golongan penduduk, keturunan dan agama ditiadakan, sehingga semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan sama di bidang pendidikan (Sugianto, 1971: 29).

Pada awal pendudukan Jepang sekolah-sekolah yang ada sebelumnya tidak diperkenankan dibuka terlebih dahulu. Kejadian itu terjadi karena persiapan untuk menyelenggarakan pendidikan belum diadakan akibat dari perpindahan kekuasaan. Keadaan tersebut tidak berlangsung lama, sekolah-sekolah yang ada dapat dibuka kembali pada tanggal 19 April 1942 (Kang Po, 22 April 1942). Pembukaan sekolah-sekolah yang sebelumnya ada harus melalui ijin pemerintah kota Surabaya. Melalui kebijakan itu sekolah-sekolah yang sebelumnya ada dapat dipantau oleh pemerintah Jepang, sehingga sekolah-sekolah tersebut dapat dikontrol melalui kebijakan-kebijakan pendidikan pemerintah Jepang.

Kebijakan Jepang yang banyak

mengubah pendidikan di Hindia Belanda adalah digantikannya bahasa pengantar di sekolah dari bahasa Belanda menjadi Bahasa Indonesia, bahasa Jepang menjadi pelajaran wajib di sekolah, dan membentuk sekolah-sekolah tandingan bagi sekolah-sekolah bentukan Belanda. Tujuan pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan pendidikan seperti itu adalah menyediakan Romusa (tenaga cuma-cuma) dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan demi kepentingan Jepang (Sugianto, 1971: 30). Sekolah-sekolah yang dibentuk Jepang antara lain *Shoto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Pertama) dan *Koto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Tinggi). Masing-masing dari sekolah itu memiliki masa belajar selama 3 tahun, jika dibandingkan dengan sekolah bentukan Belanda maka sekolah tersebut setingkat dengan MULO dan AMS.

Setelah Jepang menyerah dan Indonesia menyatakan Kemerdekaan, Belanda berusaha untuk menjajah kembali Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu. Mengetahui hal itu bangsa Indonesia mengangkat senjata demi mempertahankan kemerdekaan. Akibatnya terjadilah perang antara bangsa Indonesia melawan tentara Belanda yang lebih dikenal dengan revolusi fisik. Terjadinya revolusi fisik ini mengakibatkan perubahan atau lebih tepatnya gangguan terhadap sistem pendidikan yang ditentukan sebelumnya. Beberapa hal yang mengganggu sistem pendidikan saat itu adalah pendudukan tentara sekutu di Surabaya. Guru pengajar ikut terjun dalam peperangan, dan siswa khususnya murid sekolah menengah, juga ikut berjuang dalam peperangan. Untuk daerah Jawa Timur kesatuan tentara pelajar itu dikenal dengan sebutan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) (Heru Sukardi, 1980: 172).

Berakhirnya revolusi fisik ditandai oleh menyerahnya Belanda kepada Indonesia dengan mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Kegiatan untuk membenahi pendidikan di Indonesia

mulai dilakukan. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda dan juga yang diusahakan masyarakat Indonesia sendiri diadakan langkah-langkah penyesuaian atau Indonesianisasi. Penyesuaian inilah yang mengakhiri keberadaan sekolah-sekolah bentukan Belanda di Surabaya, yang kemudian berganti menjadi Sekolah Negeri (M. Said, 1981: 14).

Awal munculnya HBS di Hindia Belanda

Perkembangan pendidikan pada masa kolonial, berawal ketika Belanda berkuasa kembali di Hindia Belanda tahun 1816, yang sebelumnya Hindia Belanda dikuasai oleh Kerajaan Inggris. Sebagai penanda awal pemerintah kolonial Belanda bertanggung jawab terhadap pendidikan di Negeri Jajahan⁵⁾. Saat itu pertama kalinya didirikan sekolah resmi yang di buka di Batavia, tanggal 24 Februari 1817 dan diberi nama *Europeesche Lagere School* (disebut juga ELS atau Sekolah Rendah Eropa). Sekolah yang didirikan mencontoh sekolah dasar yang ada di Negeri Belanda, dan sekolah ini juga dikhususkan untuk anak-anak Eropa. Sekolah ini sampai pertengahan abad ke 19 terus berkembang ke daerah lain seperti Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Gresik (Sumarsono Mestoko, 1979: 50). Melihat daerah yang disebutkan diatas dapat disimpulkan, penyebaran sekolah ini didasarkan atas aktivitas masyarakat Belanda yang ada di Hindia Belanda khususnya di Jawa. Jadi pendirian ELS mengikuti aktivitas orang-orang Belanda, misalnya kota-kota yang dekat dengan pelabuhan, perkebunan dan pusat-pusat pemerintahan. Surabaya yang termasuk kota tersibuk di Jawa juga terpengaruh

atas kebijakan tersebut (Irna H.N Hadi Soewito dalam Devi Wahyuni Pratama, 2010:2).

Sebagai kelanjutan dari kebijakan awal maka munculah ide untuk mendirikan sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan dibentuk sesuai dan berkesinambungan dengan sekolah sebelumnya yaitu ELS. Sekolah lanjutan yang akan dibentuk diperuntukkan bagi golongan Eropa dan kaum Elite Bumiputra. Setelah beberapa kali mencoba, pada akhirnya Raja Belanda Wilem III memberi ijin untuk mendirikan sekolah lanjutan tersebut. Sekolah itu pertama kali dibuka di Batavia tahun 1860, dan untuk menghormati Raja Willem III sekolah itu diberi nama Gymnasium Willem III (atau Sekolah Menengah Willem III). "Gymnasium" di kemudian hari diubah menjadi HBS (Hogere Burgerschool) dengan lama belajar 5 tahun. Sebagian besar alasannya karena orang Eropa yang tinggal di kota dagang lainnya seperti di Surabaya juga membutuhkan sekolah semacam ini sebagai lanjutan dari ELS. Pada tahun 1875 dan 1877 didirikan masing-masing di Surabaya dan Semarang (Wasty Soemanto, 1983: 43-44). Pada tahun 1875 HBS dibentuk di Surabaya (Sumarsono Mestoko, 1979: 50-51).

Pada periode Kolonial hingga pasca kemerdekaan HBS di Surabaya pernah menempati 3 lokasi, yang pertama tahun 1875-1881 di Jl. Baliwerti, kemudian tahun 1881-1923 berada di *Regentstraat* (atau jalan kadipaten) dan yang terakhir tahun 1923-1950 yaitu di Jl. Ketabang⁶⁾. Melihat hal itu membuktikan bahwa HBS sengaja dipertahankan oleh pemerintah sebagai sekolah lanjutan resmi yang dimiliki oleh

5) Pertanggung jawaban atas pendidikan di Negeri Jajahan oleh pemerintah Kolonial Belanda didasarkan atas berkembangnya pola pemikiran baru yang melanda Eropa di abad ke 18. Pada dasarnya pola pemikiran baru itu ialah mewujudkan kesejahteraan di tanah jajahan, sehingga pemikiran tu mempengaruhi langkah-langkah dan kebijakan, termasuk kebijakan atas pendidikan di tanah jajahan. Sumarsono Mestoko, dkk. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. (Jakarta : Dep. Pk. BP3K, 1979). hlm. 47

kota Surabaya. Banyaknya orang Eropa di Surabaya juga berpengaruh terhadap keberadaan HBS Surabaya, karena HBS dapat terus berjalan tanpa terkendala kekurangan murid yang mayoritas dari orang Eropa.

Keberadaan HBS Surabaya antara tahun 1923-1942

Perpindahan HBS yang terjadi di tahun 1923 didasari atas dua faktor penting. Penyebab utama ialah karena di tempat lamanya yaitu di *Regentstraat* situasinya kurang mendukung, ditempat itu terlalu ramai akan kegiatan warga kota Surabaya (Faber, G.H. Von, 1931: 271). Penyebab yang ke dua ialah adanya perluasan kota Surabaya oleh pemerintah kota di tahun 1906 sampai 1940. Perluasan kota Surabaya pada saat itu dikarenakan banyaknya orang Eropa yang datang ke Surabaya. Hal ini memberi dorongan pemerintah kota agar membentuk pemukiman elite untuk memfasilitasi orang Eropa yang datang ke Surabaya. Tahun 1916 daerah Ketabang dibeli oleh *Gemeente* (Kotamadya) untuk dijadikan perumahan elite. Sejalan dengan itu maka untuk melengkapinya HBS pun dibangun untuk mengembangkan daerah Ketabang (Edy Budi Santoso, 2002: 59). Kedua alasan tersebut merupakan penentu awal kearah mana HBS akan berkembang di masa-masa berikutnya.

Mata Pelajaran di HBS

HBS merupakan sekolah menengah yang didirikan untuk masyarakat koloni Belanda di tanah jajahannya di Hindia Belanda. HBS yang ada di Hindia Belanda di samakan dengan HBS yang ada di Negeri Belanda berdasarkan *Concordantie-beginsel*, yaitu

prinsip “mencocokkan dan menyamakan”. Artinya HBS di Hindia Belanda dahulu dicocokkan dan disamakan dalam segala hal dengan HBS yang ada di Negeri Belanda. Jadi HBS pada waktu itu boleh kita ibaratkan sebagai hasil pencangkakan sistem pendidikan Negeri Belanda di tanah jajahannya, baik intelektual maupun cultural (Surabaya Post, 27 Oktober 1975). Persamaan dengan HBS di Negeri Belanda meliputi hampir semua aspek seperti pengajarnya orang Belanda, bahasa pengantarnya menggunakan Bahasa Belanda, termasuk juga kurikulum dan pelajaran yang diajarkan.

Melihat pelajaran yang ada di HBS kita dapat menyimpulkan bahwa di periode kolonial, Westernisasi juga dimunculkan di sekolah-sekolah bentukan negara barat (Belanda). Menurut Ki Hajar Dewantoro pendidikan di masa kolonial tidak dapat mendidik kalangan Bumiputra untuk dapat mandiri, sehingga Bumiputra selalu bergantung pada kaum penjajah. Menurutnya pendidikan yang dibentuk hanya untuk kepentingan kolonial saja dan tidak akan menjadikan Bumiputra dapat merdeka, sehingga perlu dibentuk pendidikan yang mampu mengembangkan kalangan Bumiputra dan juga berorientasi pada kepentingan Bumiputra. Pendidikan yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantoro diberi nama Pendidikan Nasional (I.Djumbuh dan, 1976: 174).

Sedikit berbeda dengan pendapat yang berikan Ki Hajar Dewantoro, Roeslan Abdulgani mengatakan hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Menurutnya pelajaran yang di berikan di HBS Surabaya (khususnya sejarah dunia), dapat menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme murid

- 6) Tempat-tempat yang disebutkan diatas sampai sekarang masih digunakan. Saat ini lokasi yang digunakan HBS pertama kali di Jl.Baliwerti ditempati Fakultas Teknik Kimia, ITS, kemudian Jl.Regen diubah namanya menjadi Jl. Kebon Rojo dan pada saat ini gedungnya di tempati sebagai Kantor Pos Besar Surabaya, dan lokasi yang terakhir di Jl.Ketabang sekarang ditempati SMA Kompleks yakni SMAN 1, SMAN 2, SMAN 5, dan SMAN 9 Surabaya. G.H. Von Faber. *Oud Soerabaia: De geschiedenis van Indie's eerste koopstad van de oudste tijden tot de instelling van den gemeenteraad* (1906). (Surabaya: Gemeente Soerabaia, 1931), hlm 269-271

Bumiputra. Memang terjadinya hal itu secara kebetulan, disini lain melalui pelajaran sejarah dunia pihak Belanda ingin mengagung-agungkan kemajuan yang ada di Barat (Eropa) dan menenggelamkan apa yang telah di capai bangsa Timur. Hal ini menjadi ironi ketika pada pelajaran sejarah yang mengajarkan mengenai Revolusi Perancis, dan juga Revolusi Jerman yang terjadi di tahun 1830-1850. Tidak berhenti disitu, di HBS juga mempelajari mengenai gerakan pemuda serta mahasiswa Jerman, tumbuhnya gerakan buruh di Jerman dan Inggris, lahirnya komunis oleh Karl Marx, dan peristiwa-peristiwa berbau perjuangan atas kaum yang tertindas lainnya. Akhirnya pelajaran Sejarah yang dimaksudkan untuk menggambarkan kemajuan di Eropa, malah berubah menjadi semangat tersendiri bagi murid HBS untuk membela kaum Bumiputra yang tertindas oleh bangsa Eropa (Belanda) (Surabaya Post Senin 30 Oktober 1975).

Tabel. 2
Mata Pelajaran yang ada di HBS hingga tahun 1935

No	Mata Pelajaran	Jumlah Jam Per-Minggu				
		I	II	III	IV	V
1	Berhitung dan Aljabar	5	5	3	2	1
2	Matematika	6	6	8	5	4
3	Mekanika	-	-	-	2	2
4	Fisika	-	-	4	4	3
5	Kimia	-	-	-	4	4
6	Botani	2	2	1	1	2
7	Biologi	1	1	1	1	1
8	Kosmografi	-	-	-	1	1
9	Undang-undang Negara	-	-	1	1	1
10	Ekonomi	-	-	1	1	1
11	Tata Buku	-	-	1	1	1
12	Sejarah	3	3	3	2	2
13	Geografi	3	3	2	1	1
14	Bahasa Belanda	5	4	3	3	2
15	Bahasa Perancis	6	5	3	2	3
16	Bahasa Jerman	5	3	3	2	3
17	Bahasa Inggris	-	4	3	2	3
18	Menggambar tangan	2	2	2	2	2
19	Menggambar garis	1	1	1	1	1
20	Kesenian	-	-	-	2	1
21	Jasmani	2	2	2	1	1

Sumber : Diolah dari Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indie, Batavia : Landsdrukkerij, 1911. Deel XXXIX No.6293, tahun 1934. Deel LXXI No.13078, dan tahun 1935. Deel LXXII No.13315

Tabel di atas merupakan rencana pelajaran yang diterima oleh murid HBS. Selain menyesuaikan daftar di atas, pelajaran yang diterima oleh murid HBS juga di bedakan berdasarkan "*afdeeling*" atau jurusannya. Pembagian jurusan dimulai ketika murid HBS telah berada di kelas IV, dan V. Pembagian kelas atau jurusan, sesuai minat dan bakat masing-masing siswa. Di HBS ada 2 jurusan atau "*Afdeeling*", yang pertama adalah *de wis- en natruukunde afdeeling*, pada *Afdeeling* ini banyak mempelajari ilmu pasti dan ilmu alam, seperti biologi, kimia, fisika, dan matematika. Jurusan yang kedua ialah *de literaire ekonomische afdeeling*, di dalam jurusan ini para siswanya banyak mempelajari mengenai ekonomi, sastra dan kebudayaan, termasuk bahasa dan kebudayaan Yunani, dan bahasa Latin (HeruSukardi, 1980: 137).

Biaya di HBS

Biaya untuk sekolah di HBS Surabaya sangat penting untuk di bahas, karena kita dapat mengetahui banyak hal di dalamnya. Biaya yang ada pada HBS Surabaya di era kolonial dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan sosial yang ada di di sekolah itu maupun di Surabaya secara umum. Aturan umum tidak tertulis yang menyebutkan bahwa semakin mahal biaya yang dikeluarkan siswa, maka fasilitas pendidikan yang diterima seorang murid juga semakin baik. Berlakunya aturan di atas dapat kita lihat melalui daftar biaya yang ada di HBS Surabaya dengan membandingkan fasilitas yang diterima para murid. Menurut kesaksian Soekarno yang pernah bersekolah di HBS di tahun 1917 sampai 1922, memang sulit untuk seorang Bumiputra yang bersekolah di HBS, karena biaya yang terlampau mahal. Ketika itu Soekarno diwajibkan untuk membayar f 15,00 sebulan untuk uang sekolah, dan juga f 75,00 setiap tahun untuk uang buku (Cindy Adams, 2001: 48), hal tersebut dirasa berat oleh seorang

Soekarno. Kita dapat melihat bahwa biaya yang harus di tanggung untuk bersekolah Di HBS termasuk mahal, mengingat jika dibandingkan dengan gaji ayah Soekarno sebelum naik jabatan hanyalah f25 (Cindy Adams, 2001: 31).

HBS didirikan untuk kalangan menengah ke atas, untuk kalangan dari taraf ekonomi rendah pihak HBS sudah memberikan toleransi biaya menurut besar gaji orang tua. Untuk kasus Soekarno, keluarga beliau memang tergolong di bawah standar taraf ekonomi rendah yang di berikan oleh pihak HBS, sehingga biaya yang wajib di bayar adalah biaya yang paling murah di HBS. Jika kita melihat pada zaman kolonial, dimana Bumiputera sebagian besar di bawah garis kemiskinan maka hanya sedikit Bumiputera yang dapat mengenyam pendidikan di HBS selebihnya hanya orang Eropa yang mendominasi jumlah murid yang ada pada institusi ini.

Di tahun yang hampir bersamaan institusi HBS memberikan informasinya mengenai sistem pembiayaan yang diwajibkan di sekolah kepada muridnya. Sistem pembiayaan yang ada pada masa kolonial sedikit unik, karena besar jumlah uang yang diwajibkan untuk bersekolah di HBS berbeda-beda. Hal itu berdasarkan dari penghasilan orang tua serta urutan kelahiran muridnya. Berikut informasi sistem pembiayaan yang di publikasikan di tahun 1928 hingga 1942.

Tabel. 6

Sistem pembiayaan di HBS tahun 1928-

	1942			
Penghasilan orang tua dalam satu bulan	Bagi anak ke 1	Bagi anak ke 2	Bagi anak ke 3	Bagi anak ke 4 dan seterusnya
f 1500 keatas	f32.-	f 20.-	f17.5	f 15.-
f1500 hingga f 1200	f28.-	f 17.5	f 15.-	f 13.-
f1200 hingga f900	f24.-	f 15.-	f 13.-	f10.5
f900 hingga f600	f21.-	f 13.5	f 11.-	f9.-
f600 hingga f400	f18.-	f 12.-	f9.5	f7.-
f400 hingga f75 atau dibawah f75	f15.-	f9.5	f8.-	f6.5

Sumber : Diolah dari *Almanak Ringkasan Tahoen 1928, 1932, 1935, dan 1942*, Bale Poestaka dan Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indie, Batavia : Landsdrukkerij, 1928. Deel LXV No.11213, tahun 1933 Deel LXX No.12819, dan tahun 1937 Deel LXXIV No.13651

Dibandingkan dengan sekolah yang lainnya, HBS mempunyai biaya termahal. AMS yang notabene sebagai sekolah yang sistem pengajarannya hampir sama dengan HBS biaya termahal hanya sebesar f 26,00 dan terendah adalah f 7,5 (untuk anak pertama). Ini membuktikan bahwa HBS dibentuk untuk kepentingan kelas menengah ke atas bukan untuk para Bumiputera yang sebagian memiliki taraf ekonomi menengah ke bawah.

Dari daftar biaya tersebut kita juga dapat mengetahui bahwa sistem pendidikan yang ada pada jaman kolonial sangat di atur dengan tertata dan seksama. Hanya untuk masalah biaya saja, pendidikan jaman kolonial memperhatikan masalah gaji orang tua dan juga anak yang keberapa yang menjadi muridnya. Perhatian khusus tersebut berlaku juga di setiap sekolah yang ada dalam naungan pemerintah kolonial. Hal ini membuktikan bahwa di jaman kolonial pemerintah sangat memperhatikan masalah pendidikan untuk masalah biaya. Perhatian tersebut diimbangi juga dengan tidak ada kenaikan biaya yang diwajibkan pada murid, karena dari tahun 1917 (saat Soekarno mulai masuk HBS) hingga 1942 biaya yang wajibkan bagi murid HBS tidak mengalami kenaikan atau tidak berubah.

Jadi dengan mengetahui biaya HBS pada masa kolonial, kita dapat melihat golongan masyarakat mana saja yang dapat mengenyam pendidikan di HBS. Seperti yang sebelumnya disebutkan bahwa HBS ditujukan pada orang yang taraf ekonominya tinggi, sebagian besar yang menyandang status tersebut ialah orang Eropa. Sedangkan masyarakat Bumiputera dan Timur Asing yang ingin mengenyam pendidikan sekolah menengah atas, akan lebih memilih AMS dan MULO sebagai sekolah mereka. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat tersebut memiliki taraf ekonomi yang cenderung rendah, dan juga biaya yang

ditanggungungkan kepada para murid di AMS lebih rendah dibandingkan dengan HBS. Kita juga dapat melihat bahwa pendidikan yang ada pada jaman kolonial, mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sistem pembayaran yang tertata secara baik dan biaya pendidikannya pun cenderung tidak mengalami peningkatan atau semakin mahal dari tahun ke tahun.

Keberadaan HBS Surabaya antara tahun 1942-1945

Pada tahun 1942 Jepang datang dengan membawa semangat yang terkenal dengan sebutan *Hakko Ichiu*. Maksudnya dari ideologi itu adalah Jepang ingin memaksa bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk memenangkan perang Asia Timur Raya, agar dari kemenangan itu dapat tercapai kemakmuran bersama bagi negara-negara yang ada di Asia Timur Raya. Semboyan serta semangat yang dicita-citakan Jepang itu hanyalah untuk mengelabui bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara, agar dapat membantu Jepang memenangkan perangnya melawan tentara sekutu. Adanya tentara Jepang yang menduduki Hindia Belanda berakhirlah kolonialisme Belanda di tahun 1942. Hal ini memberikan perubahan besar-besaran di wilayah Hindia Belanda termasuk dalam bidang pendidikan.

Perubahan yang terjadi di HBS Surabaya

Kedatangan Jepang di Indonesia tidak serta merta menghilangkan pengaruh-pengaruh Belanda yang sudah ada sebelumnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda terhadap wilayah Hindia Belanda masih dianut meskipun pemegang pemerintahan sudah berganti. Hal ini terjadi diakibatkan perhatian pemerintahan Jepang difokuskan pada perang Asia Timur Raya yang terjadi pada saat itu. Kepentingan Jepang menguasai Indonesia berorientasi pada kemiliteran, sehingga perhatian pemerintah Jepang

pada pendidikan kurang mendapat perhatian.

Sesaat tentara Jepang mulai berkuasa, tak ada satu sekolah menengah pun yang diperkenankan dibuka kembali. Hal tersebut dilakukan karena belum adanya tenaga pengajar dan fasilitas lain seperti buku yang sesuai dengan kebijakan pendidikan pemerintah Jepang (Wasty Soemanto, 1983: 51). Kebijakan tersebut tidak bertahan lama, pembukaan sekolah-sekolah dilakukan terhitung pada 29 April 1942, melalui undang-undang dalam *Kang Po* (Kang Po, 22 April 1942). Melalui keputusan itu barulah sekolah-sekolah di Indonesia dibuka kembali setelah mendapat izin atau dengan cara melapor ke pemerintah terlebih dahulu. Pada masa pendudukan Jepang bangsa Eropa dipandang sederajat dengan bangsa lain.

Kondisi seperti itu turut memberi dampak bagi kondisi pendidikan yang ada di HBS Surabaya. Perubahan bahasa pengantar dan dihilangkannya penerimaan siswa berdasarkan golongan, memberi sedikit perubahan dan penyesuaian bagi HBS Surabaya. Penyesuaian tidak dengan mengganti bahasa pengantar HBS dari Bahasa Belanda menjadi Bahasa Indonesia, melainkan dengan menambahkan pelajaran bahasa Indonesia pada kelas 1 dan 2. Perkembangannya sangat memuaskan sehingga pada tahun 1946 rencana untuk mengajarkan pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3, 4 dan 5 dicoba untuk dilakukan (Pandji Ra'jat, tanggal 22 Oktober 1946). Keadaan tersebut dapat memperkenalkan Bahasa Indonesia lebih luas di kalangan masyarakat khususnya murid HBS Surabaya.

Kebijakan penerimaan murid tanpa di dasarkan pada golongan yang dilakukan pemerintahan Jepang, tidak serta merta membuat HBS dibanjiri murid dari golongan non Eropa. Justru peralihan dari pemerintahan Belanda ke Jepang, maka sekolah-sekolah bentukan Belanda dan berbahasa pengantar bahasa Belanda

tidak diminati kaum Bumiputra maupun Tionghoa. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menanggapi bahwa bangsa Belanda merupakan bangsa yang penjajah sehingga hal-hal yang berbau Eropa sudah tidak diminat, dan berganti memberi minat kepada kebudayaan Jepang. Ini akibat propaganda Jepang dimana diawal kedatangannya akan berjanji memerdekakan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan.

Pemerintah Jepang juga mendirikan sekolah-sekolah yang sederajat yang merupakan tandingan dari sekolah-sekolah bentukan Belanda seperti MULO, AMS, dan HBS. Seperti yang terjadi di Jl. Darmoboulevard No.49 Surabaya pada 21 September 1942, ditempat itu dibuka sebuah sekolah bentukan Jepang yang lulusannya setara dengan HBS 5 tahun ataupun AMS. Sekolah itu diberi nama SMT atau Sekolah Menengah Tinggi, didalamnya juga dikenalkan dua jurusan sama seperti di HBS, yaitu bagian Litterair dan Ekonomi, serta Wis dan Natuurlunde (Perwarta Perniaga, 12 september 1942). Keadaan yang mempertegas bahwa sekolah SMT dibentuk dengan tujuan menghilangkan hegemoni Belanda di Indonesia ialah SMT dibuka di bekas gedung HBS Ursulinen (Pembangoen, 17 september 1942).

Pembukaan Sekolah Menengah Tinggi semacam ini tidak hanya terjadi di Surabaya saja melainkan di daerah lain seperti di Batavia, Magelang, Pekalongan, Bogor, Djember, dan Tjirebon (Kang Po, 25 Agoestoes dan 17 Desember 1942). Berikut adalah sebuah brosur tentang pembukaan Sekolah Menengah Pertama di Tjirebon.

Propaganda Jepang dan banyaknya sekolah-sekolah tandingan yang sederajat dengan HBS maka komposisi murid HBS tidak mengalami perubahan, yaitu masih didominasi oleh bangsa Eropa dan golongan Timur Asing dan Bumiputra masih menjadi minoritas.

Pada periode pendudukan Jepang di Indonesia, secara garis besar

Gambar. 4
Brosur Sekolah Menengah Pertama di Tjirebon



Sumber : Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Koran *Tjahaja* 15 Desember 1942

pemerintah tidak memberi perhatian sama sekali terhadap sekolah-sekolah bentukan

Belanda termasuk HBS. Di bidang pendidikan, pemerintah Jepang lebih memperhatikan keberadaan sekolah-sekolah menengah yang mereka bentuk saja, seperti Sekolah Menengah Pertama atau SMP yang setara dengan HBS 3 tahun dan Sekolah Menengah Tinggi atau SMT yang setara dengan HBS 5 tahun. Hal ini terlihat pada *Kang Po* dari Vol 1 sampai 4 tidak ada aturan mengenai keberadaan HBS maupun sekolah bentukan Belanda lainnya seperti MULO dan AMS. Berbeda sekali ketika masa pendudukan Belanda, pada edisi *Bijblad op het Staatsblad* antara tahun 1905 hingga 1949 hampir disetiap edisinya aturan mengenai HBS dan sekolah bentukan Belanda lainnya selalu dimuat.

Keberadaan HBS Surabaya antara tahun 1942-1945

Peristiwa Proklamasi Kemerdekan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, mengakhiri periode pendudukan tentara Jepang di Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia memberi perubahan dari

periode penjajahan ke periode kemerdekaan, dan menyebabkan terjadinya perubahan dalam segala aspek kehidupan bangsa, termasuk juga sistem pendidikan. Melalui menteri PP dan K yang pertama Ki Hajar Dewantara mengintruksikan untuk melakukan Perubahan dalam bidang pendidikan, yang meliputi landasan idiil, tujuan pendidikan, sistem persekolahan, dan kesempatan yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Tentu saja aturan-aturan yang disebutkan tadi dianut juga pada sistem pendidikan yang ada di Surabaya (Abu Ahmadi, 1996: 60).

Setelah Jepang menyerah dan Indonesia menyatakan Kemerdekaan, Belanda berusaha untuk menjajah kembali Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu. Mengetahui hal itu bangsa Indonesia mengangkat senjata demi mempertahankan kemerdekaan. Akibatnya terjadilah perang antara bangsa Indonesia melawan tentara Belanda yang lebih dikenal dengan revolusi fisik. Terjadinya revolusi fisik ini mengakibatkan perubahan atau lebih tepatnya gangguan terhadap sistem pendidikan yang ditentukan sebelumnya. Beberapa hal yang mengganggu sistem pendidikan saat revolusi fisik terjadi adalah pendudukan tentara Jepang di beberapa kota termasuk di Surabaya, guru pengajar ikut terjun dalam peperangan, dan siswa khususnya murid sekolah menengah, juga ikut berjuang dalam peperangan. Untuk daerah Jawa Timur

kesatuan tentara pelajar itu dikenal dengan sebutan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) (Heru Sukardi, 1980: 172).

Para pelajar HBS Surabaya dalam hal ini juga ikut andil dalam revolusi fisik yang terjadi di Surabaya. Semangat yang timbul dikalangan pelajar HBS Surabaya tidak lepas dari adanya semangat kebebasan yang di pelajari saat mereka berada di bangku sekolah. Saat di bangku sekolah para pelajar HBS sudah banyak diberikan pandangan akan revolusi-revolusi yang terjadi di Eropa melalui pelajaran sejarah dunia. Hal itu memberi semangat tersendiri bagi para pelajar untuk ikut mengangkat senjata dan bergabung dalam TRIP atau BKR yang ada di Surabaya.

Masa akhir hingga di Indonesianisasi

Berakhirnya revolusi fisik ditandai oleh menyerahnya Belanda kepada Indonesia pada tahun 1949, kegiatan untuk membenahi pendidikan di Indonesia mulai dilakukan. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda dan juga yang diusahakan masyarakat Indonesia sendiri diadakan langkah-langkah penyesuaian atau Indonesianisasi. Penyesuaian inilah yang mengakhiri keberadaan HBS Surabaya, dan berganti menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) (M. Said, 1981: 14).

Antara tahun 1949-1950 HBS di seluruh Indonesia masih tidak kehilangan peminat. Murid dari golongan Eropa masih menjadi mayoritas di sekolah

Tabel. 7
Jumlah murid HBS di seluruh Indonesia tahun 1949-1950

Jenis sekolah	Banyak sekolah	Banyak murid	Laki-laki				Perempuan			
			Indo.	Er.	T.Hoa	Lain-lain	Indo.	Er.	T.Hoa	Lain-lain
c. HBS	6	827	16	393	20	3	7	368	18	2
h. HBS	4	787	47	228	171	5	34	192	106	4

Sumber : diolah dari *Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beberapa angka yang mengenai keadaan pengajaran pada permulaan tahun pengajaran 1949-1950*. No : S/100, Djuni 1950

tersebut. Hanya saja jumlah murid dari etnis Tionghoa mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan pada tabel berikut.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa HBS masih bertahan, walaupun pemerintahan sudah berpindah tangan ke pemerintah Indonesia. Keadaan kacau yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akibat dari revolusi fisik, tidak berdampak besar bagi HBS yang ada hingga tahun 1950.

HBS Surabaya di masa akhir berdirinya masih memegang kultur Belanda yang menjadi citranya dari pertama kali dibentuk. Direktornya tetap orang Belanda yaitu P.J Velson yang menjabat pada tahun 1944 hingga 1948, setahun kemudian diserahkan kepada B.J Pieters yang juga orang Belanda. Pada tanggal 1 Agustus 1950 telah terjadi serah terima direktur sekolah dari B.J Pieters kepada Marah Kamil S.P, yang merupakan direktur pertama dari kalangan Bumiputra. Beliau menjabat dari tahun 1950 hingga 1952. Mulai saat itu selalu dipimpin oleh bangsa sendiri dan nama sekolah pun berubah menjadi SMA II B Surabaya. Tanggal penyerahan dari belanda kepada bangsa Indonesia dijadikan logo sekolah tersebut.

Indonesianisasi yang terjadi di HBS Surabaya dilakukan juga tidak luput dari beberapa hambatan. Kesulitan yang dihadapi ialah masalah kekurangan tenaga guru. Hal ini terjadi karena belum ada lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga guru Sekolah Menengah Pertama di Surabaya. Penyebabnya adalah Revolusi Fisik yang terjadi di Surabaya, sehingga persiapan untuk melakukan kegiatan pendidikan oleh pemerintah Indonesia terhambat. Pada akhirnya sampai 1952 guru-guru yang mengajar di bekas sekolah HBS adalah guru-guru yang berijazah *Hoofdte* ditambah mahasiswa-mahasiswa dari berbagai fakultas (Heru Sukardi, 1980: 182).

Kesimpulan

Keberadaan HBS Surabaya di tahun 1923-1950, merupakan sekolah yang dikhususkan untuk kalangan elite dan tergolong sekolah mewah di Surabaya. Murid-murid yang bersekolah di HBS Surabaya sebagian besar dari golongan Eropa, dan sebagian kecil dari golongan elite Bumiputra. Fasilitas yang diberikan adalah yang terbaik di masa itu. Hal ini sebanding dengan mahalnya biaya untuk bersekolah di HBS. Pada masa kolonial HBS Surabaya mendapat perhatian baik dari pemerintah Hindia Belanda. Sekolah tersebut berkultur Belanda, sehingga bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Pada masa Jepang terjadi sedikit perubahan pada HBS Surabaya mengikuti kebijakan pemerintah Jepang. Perubahan yang terjadi adalah Bahasa Indonesia menjadi salah satu pelajaran wajib dan hilangnya diskriminasi ras untuk memasuki HBS Surabaya. Pada masa ini HBS dan sekolah bentukan Belanda lainnya kurang mendapat perhatian dari pemerintah Jepang. Pasca proklamasi keberadaan HBS Surabaya sedikit terganggu akibat adanya pertempuran 10 November di Surabaya. Terjadinya pertempuran mengakibatkan kegiatan belajar mengajar dihentikan. Pada saat pertempuran terjadi gedung HBS Surabaya diperebutkan untuk dijadikan markas oleh rakyat Surabaya maupun tentara sekutu. HBS Surabaya pada akhirnya di Indonesianisasi menjadi sekolah menengah atas negeri pada 1 Agustus 1950.

Pada masa kolonial fungsi HBS Surabaya adalah menyediakan sekolah lanjutan untuk masyarakat Eropa. Banyaknya masyarakat Eropa yang datang ke Surabaya, mendorong pemerintah kolonial untuk menyediakan sekolah yang kualitasnya sama dengan sekolah di Eropa. Selain itu HBS Surabaya juga menyediakan tenaga terdidik untuk kepentingan pemerintah kolonial. Tenaga terdidik lulusan HBS diharapkan mampu mengisi posisi birokrasi pemerintah.

Pada masa pendudukan Jepang HBS Surabaya memiliki fungsi sebagai penyedia Romusa (tenaga cuma-cuma) dan prajurit-prajurit untuk kepentingan perang Jepang. Di masa ini pemerintah Jepang membentuk beberapa sekolah yang tujuannya menggeser keberadaan sekolah-sekolah bentukan Belanda. Lulusan dari sekolah bentukan Jepang akan lebih diutamakan dalam birokrasi pemerintahan dibandingkan dengan lulusan dari sekolah bentukan Belanda. Selain itu HBS Surabaya memiliki fungsi sebagai penyebaran penggunaan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia wajib diajarkan di HBS Surabaya akibat dari kebijakan pendidikan pemerintah Jepang.

Pada pertempuran 10 November di Surabaya gedung HBS Surabaya berkontribusi sebagai markas TKR dan BKR. Sebelum dimiliki pihak Indonesia, gedung HBS Surabaya dikuasai tentara sekutu dan sempat diperebutkan oleh kedua pihak. Saat perebutan gedung HBS Surabaya, terjadi pertempuran sengit di sekitar Gedung HBS Surabaya. Sehingga di depan gedung tersebut dibangun prasasti untuk mengenang para tentara pelajara Surabaya yang gugur. Lebih dari itu HBS Surabaya juga berkontribusi penyedia sekolah bagi pemerintah Indonesia yang baru saja terbentuk pasca proklamasi. Sekolah-sekolah bentukan Belanda dan Jepang secara tidak langsung menjadi penyedia kebutuhan atas pendidikan bagi pemerintah Indonesia. Sekolah-sekolah yang ada sebelumnya pada akhirnya di Indonesianisasi menjadi sekolah negeri, dan digunakan untuk menjalankan pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Publikasi Resmi

- Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indie, Batavia : Landsdrukkerij, 1911. Deel XXXIX No.6293
— . Batavia : Landsdrukkerij, 1928.

Deel LXV No.11213

— . Batavia : Landsdrukkerij, 1933.

Deel LXX No.12819

— . Batavia : Landsdrukkerij, 1934.

Deel LXXI No.13078

— . Batavia : Landsdrukkerij, 1935.

Deel LXXII No.13315

— . Batavia : Landsdrukkerij, 1937.

Deel LXXIV No.13651

Kang Po, Vol. I, No. 1-21, Batavia, 25
Agoestoes 1942

— . Batavia, 17 Desember 1942

— . Batavia, 22 April 1942

*Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan Republik Indonesia.
Beberapa angka yang mengenai
keadaan pengajaran pada
permulaan tahun pengajaran
1949-1950. No : S/100, Djuni
1950*

Almanak Ringkasan Tahoen, Bale
Poestaka : Soerabaia, 1928

— . Bale Poestaka : Soerabaia, 1932

— . Bale Poestaka : Soerabaia, 1935

— . Bale Poestaka : Soerabaia, 1942

B. Koran

Surabaya Post, 27 Oktober 1975

— 30 Oktober 1975

Pandji Ra'jat, 22 Oktober 1946
(Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie)

Perwarta Perniaga, 12 September 1942
(Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie)

Pembangoen, 17 September 1942
(Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie)

Tjahaja, 15 Desember 1942 (Nederlands
Instituut voor Oorlogsdocumentatie)

C. Jurnal dan Skripsi

Edy Budi Santoso, dkk., "*Kota Surabaya*"
Sebuah Tinjauan dalam

- Perspektif Historis*. Jurnal Sejarah Sosial, (Surabaya : Lembaga Penelitian Universitas Airlangga / Fakultas Sastra, Universitas Airlangga, 2002).
- Devi Wahyuni Pratama, “*Dari Simpang-sche Societeit hingga Balai Pemuda: Potret Simbol Kekuasaan 1907-1970*”, (Skripsi Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, 2010).
- Astutik, “Pendidikan Dasar Umum di Surabaya tahun 1945-1964 : Tinjauan Historis Terhadap Eksistensi Sekolah Rakyat.”, (Skripsi Mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, 2005).
- D. Buku-buku**
- Adams, Cindy. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Jakarta: Ketut Masagung Coporation, 2001.
- Ahmadi, Abu. *Sejarah Pendidikan*. Semarang: CV. Toha Putra, 1996.
- Faber, G.H. Von. *Oud Soerabaia: De geschiedenis van Indie's eerste koopstad van de oudste tijden tot de instelling van den gemeenteraad (1906)*. Surabaya: Gemeente Soerabaia, 1931.
- Frederick, William H. *Pandangan dan Gejolak, masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*. Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Heru Sukadri, dan Umiati.R.A. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978.
- Said, M. *Pendidikan Abad Keduapuluh dengan latar belakang kebudayaannya*. Jakarta: Mutiara, 1981.
- Sugianto. *Sejarah Perkembangan Sekolah Lanjutan Umum Tingkat Atas di Indonesia, cet. Pertama*. Jakarta: Penerbit Widjaya, 1971.
- Sumarsono Mestoko, dkk. *Pendidikan di Indonesia dari jaman ke jaman*. Jakarta: Dep. Pk. BP3K, 1979.
- Wasty Soemanto, dkk. *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.